

## Formasi Ketiga Kabinet Kerja

Wahyudi Kumorotomo

Setelah beberapa waktu menjadi rumor politik, presiden Jokowi akhirnya mengumumkan kocok-ulang (*reshuffle*) kabinet di halaman istana negara kemarin. Harapan terhadap kiprah Kabinet Kerja Jilid III ini demikian tinggi mengingat bahwa Indonesia sedang menghadapi banyak masalah secara domestik maupun internasional. Seperti disampaikan oleh Presiden, masalah kesenjangan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tengah kondisi global yang kurang menggembirakan adalah tantangan yang jelas ada di depan mata.

Berbagai indikator ekonomi makro memang menunjukkan betapa beratnya tantangan tersebut. Pertumbuhan PDB hanya mencapai 4,9 persen, meleset dari target pemerintah sebesar 5,2 persen. Defisit APBN saat ini sudah sekitar 2,53 persen dari pendapatan domestik, semakin mendekati angka yang diperbolehkan Undang-undang, yaitu 3 persen. Di tengah upaya ambisius pemerintah untuk membangun infrastruktur, pemerintah harus menerima kenyataan bahwa pemasukan pajak hingga pertengahan tahun baru mencapai 33,8 persen. Di dalam negeri, pemerintah seperti tidak berdaya mengatasi lonjakan harga daging dan pangan, kelesuan investasi, dan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Sementara itu dari luar negeri begitu banyak potensi kelesuan global akibat pelambatan ekonomi Tiongkok, pemulihan ekonomi yang kurang meyakinkan di AS dan ketidakpastian baru di Eropa akibat hasil referendum Brexit yang di luar dugaan.

Masuknya sembilan nama baru dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sekarang ini menguatkan kesan tentang keinginan pemerintah untuk memperkuat tim ekonomi dan segera membenahi kondisi ekonomi Indonesia yang makin sulit. Terbentuknya formasi baru kabinet ini boleh jadi tidak terlalu diperdulikan oleh rakyat awam. Yang mereka pahami dalam keseharian adalah bahwa harga-harga komoditas pangan dan Sembako terus melonjak, sementara anak-anak muda yang sudah berijazah sarjana pun semakin sulit memperoleh pekerjaan. Kesemuanya merupakan implikasi dari kondisi ekonomi makro yang melambat. Oleh karena itu, keberhasilan perombakan kabinet kali ini sangat tergantung kepada kekompakan tim ekonomi dalam formasi kabinet yang baru untuk mengatasi masalah-masalah keseharian rakyat secara cepat dan nyata. Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menkeu akan memberi warna tersendiri dalam tim ekonomi yang sekarang ini terdiri dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito. Namun bagi sebagian pengamat yang skeptis, sosok tim ekonomi saat ini menunjukkan tergesernya paradigma kemandirian ekonomi seperti tergambar dalam visi Trisakti oleh paradigma pasar bebas.

Ada empat kata kunci yang tampaknya mendasari pertimbangan Jokowi-JK dalam melakukan perombakan kabinet kali ini, yaitu: perubahan dukungan Parpol, tantangan global, kinerja menteri, dan koordinasi untuk menghindari kegaduhan. Masuknya dukungan dari dua partai yang selama ini berada di kubu oposisi ke kubu pemerintah, yaitu PAN dan Golkar jelas membawa pengaruh besar dalam perombakan kabinet kali ini. Meskipun profesionalisme senantiasa disebutkan sebagai pertimbangan pokok Presiden, tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya Muhadjir Effendi dalam posisi Mendikbud dan Asman Abnur dalam posisi Menpan dan RB adalah untuk mengakomodasi PAN dan masuknya Airlangga Hartarto dalam

posisi Menteri Perindustrian adalah untuk mengakomodasi Golkar. Hal yang sama berlaku bagi masuknya Wiranto, pimpinan Hanura yang harus turun-gunung untuk menjadi Menko Polhukam karena dua kader Parpol ini harus ditempati sosok baru.

Selanjutnya, seperti disampaikan Presiden dalam pidato pengantar pengumuman formasi baru Kabinet Kerja, tantangan global merupakan salah satu kenyataan yang harus direspon secara cepat oleh para menteri. Sri Mulyani yang sudah memiliki reputasi nasional maupun internasional dipandang sangat cocok untuk mengemban tugas di Kemenkeu, sekaligus untuk mengamankan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang baru berjalan dalam beberapa minggu ini. Tantangan bagi Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan adalah meningkatkan daya-saing di tengah kelesuan ekonomi global. Inefisiensi dan lemahnya daya-saing komoditas nasional yang diakibatkan oleh lamanya waktu bongkar-muat (*dwellling time*) di pelabuhan adalah sesuatu yang sudah beberapa kali disampaikan oleh Jokowi.

Sebagian dari penggantian menteri memang dilakukan karena kinerjanya yang buruk atau berbagai kesalahan kebijakan yang selama ini menjadi sorotan publik seperti yang terungkap di media massa maupun media sosial. Penggantian pejabat Menteri Desa dan PDDT antara lain karena serapan anggaran kementerian yang selama ini masih rendah dan banyak laporan evaluasi yang buruk terkait dengan rekrutmen pendamping dana desa. Meskipun Eko Putro Sanjoto adalah menteri yang disodorkan oleh Parpol yang sama, yaitu PKB, kinerja dan efektivitas penggunaan dana desa yang merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah Jokowi akan menjadi taruhan utama. Menpan dan RB yang sebelumnya sering melakukan *blunder* dan pernyataan yang melampaui kewenangannya juga banyak menjadi sorotan sehingga sekarang ini dipercayakan kepada Asman Abnur yang merupakan representasi PAN. Keberhasilan daya-saing nasional dan pelaksanaan program pembangunan dalam visi Nawacita memang sangat tergantung kepada reformasi birokrasi yang semestinya menjadi tugas pokok dari Kemenpan dan RB. Demikian pula, kinerja Kementerian Agraria dan Tata-ruang (Kepala BPN) tampaknya belum memuaskan karena kurang cekatan dalam menyiapkan pembebasan lahan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi-JK. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjadi Kepala Bappenas sekarang digeser ke Kementerian Agraria dan Tata-ruang.

Pertimbangan lain untuk merombak kabinet yang akan mempengaruhi kinerja dan reputasi pemerintah dalam tiga tahun ke depan adalah sistem koordinasi yang ingin ditekankan oleh Jokowi. Sebagian dari menteri yang diganti adalah yang selama ini menimbulkan kontroversi, kegaduhan, serta mengambil inisiatif yang konon kurang sejalan dengan kebijakan presiden. Menteri Perhubungan tampaknya diganti karena kontroversi tentang perijinan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan penggunaan terminal Ultimate di Bandara Soekarno Hatta. Posisi jabatan menteri sekarang diserahkan kepada Budi Karya Sumadi, mantan direktur Angkasa Pura yang sudah lama malang-melintang di BUMN. Demikian pula, Kementerian ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral) selama ini memang terlibat dalam banyak kontroversi tentang investasi asing serta alternatif penambangan Blok Masela antara metode *off-shore* atau *on-shore*. Menariknya, jabatan Menteri ESDM sekarang ini dipercayakan kepada Archandra Tahar, seorang profesional di bidang pertambangan yang memiliki beberapa paten metode penambangan lepas pantai (*off shore*). Apapun kebijakan yang akan diambil oleh menteri baru, ketahanan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan akan merupakan tantangan tersendiri dari kementerian ESDM.

Demikianlah, formasi ketiga dari Kabinet Kerja terbentuk karena berbagai perubahan menyangkut konstelasi politik maupun tantangan kebijakan yang diidentifikasi oleh pemerintah Jokowi-JK. Dengan postur kepemimpinan Jokowi yang semakin kuat, koordinasi kebijakan tampaknya menjadi agenda pokok. Dalam pengarahannya kepada anggota kabinet yang berlangsung segera setelah pelantikan, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada visi dari menteri, para menteri harus menjalankan tugas sesuai visi pemerintah Jokowi-JK. Sebuah pernyataan yang lugas tentang pentingnya koordinasi kebijakan yang selama ini diabaikan oleh para menteri dari Parpol maupun dari kalangan profesional. Selamat bertugas para menteri baru di Kabinet Kerja. Anda punya kesempatan untuk membuktikan kemampuan kepada rakyat. Tetapi waktu memang tidak banyak lagi.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah Ketua Pengelola dan guru-besar  
pada Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM.